

Bisnis Indonesia: Keadaan Sekarang dan Prospeknya

J. PANGLAYKIM

PENDAHULUAN

Tulisan ini menyoroti aspek bisnis dari perekonomian Indonesia. Pembahasan para ekonom dapat ditemukan pada jurnal-jurnal seperti *The Indonesian Quarterly* dan *The Economic Bulletin* oleh konsultan-konsultan dan juga pada surat-surat kabar lokal dan majalah bisnis. Masyarakat media massa juga mewawancarai para pengusaha untuk memperoleh persepsi mereka mengenai ekonomi Indonesia pada umumnya dan sektor bisnis pada khususnya.

Penulis bermaksud untuk menyoroti perkembangan bisnis di Indonesia sebagai bagian dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Dengan kata lain, tulisan ini lebih merupakan pandangan seorang pengusaha daripada seorang ekonom, walaupun mungkin sekali terdapat beberapa kesamaan dalam pendekatan.

KEADAAN BISNIS: REFLEKSI EKONOMI NASIONAL

Keadaan bisnis selalu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Kita telah melihat bahwa sejak 1968 sektor bisnis telah mengalami pasang-surut tergantung pada kemampuan ekonomi nasional untuk menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan.

''Standing'' kredit nasional Indonesia di kalangan masyarakat perbankan internasional telah memberi keuntungan bagi kelompok-kelompok masyarakat bisnis setempat yang memiliki akses sumber-sumber keuangan ini. Mereka telah menandatangani sejumlah transaksi keuangan yang memungkinkan mereka membiayai berbagai proyek nasional, sehingga dengan demikian

mereka mampu memulai¹ apa yang dikenal dalam sektor Penanaman Modal Asing sebagai "package deal."

Ketika pengusaha swasta mulai beroperasi pada 1968, mereka belum berada pada posisi modal yang diperlukan untuk beratus-ratus usaha patungan dengan pengusaha Jepang. Namun demikian, selama bertahun-tahun mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keahlian tetapi juga kedudukan dalam masyarakat perbankan dan bisnis internasional, dan ini telah memungkinkan mereka untuk memulai memereteli "package deal."

Jika sekarang mereka masing-masing mulai mengadakan usaha patungan, katakanlah, suatu pabrik yang menghasilkan produk industri yang tidak terlalu canggih, ia akan dapat menyediakan modal, keahlian teknis (yang bisa disewa dari luar negeri), dan manajemen, jadi membuatnya lebih independen dan akhirnya menjadi partner yang sederajat dengan partner asing. Kemampuan yang telah dikembangkan lebih daripada 20 tahun ini mencerminkan kemampuan negara untuk mengembangkan ekonomi nasionalnya.

Setelah melewati semacam masa kejayaan, di mana banyak kelompok swasta telah mendirikan sejumlah usaha manufaktur dalam bentuk usaha patungan untuk kepentingan asing, atau sebagai usaha domestik nasional, pasaran nasional tampaknya telah mencapai kejenuhan. Lagipula, menurunnya daya beli telah mempengaruhi pertumbuhan sektor manufaktur sedemikian rupa di mana banyak dari mereka telah beroperasi di bawah kapasitas penuh.

PERTUMBUHAN YANG LAMBAN

Tiga tahun pertama dari Repelita III telah menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata antara 6,5% dan 7%. Selama tahun fiskal 1982/1983 ekonomi Indonesia menghadapi masalah-masalah seperti kelimpahan suplai minyak dunia yang mempengaruhi pendapatan negara dari sektor minyak. Sektor impor nasional tampaknya mencerminkan kenaikan, terutama karena komitmen tahun-tahun sebelumnya ada sejumlah besar proyek yang dirintis pemerintah dan membutuhkan pembiayaan valuta asing. Ini mempengaruhi posisi neraca pembayaran nasional, jadi membebani sumber-sumber keuangan negara. Menurut sejumlah sumber, tingkat pertumbuhan 1983 dianggap zero berdasarkan harga 1981. Dibandingkan dengan 6,5% selama tiga tahun pertama Repelita III, kelesuan mempengaruhi kegiatan-kegiatan bisnis.

¹Usaha patungan antara partner nasional dan asing, dalam hal mana kontribusi partner asing berupa modal, manajemen, dan teknologi.

Menghadapi kemungkinan penurunan harga minyak lebih lanjut, penurunan pendapatan devisa Indonesia dan sumber-sumber anggaran diharapkan akan berlanjut selama beberapa tahun. Dirasakan perlu untuk mengambil keputusan kebijakan segera yang akan meletakkan dasar-dasar pemulihan. Di antara keputusan-keputusan penting yang diambil adalah devaluasi Rupiah 28% terhadap dollar AS yang mempengaruhi banyak perusahaan swasta, yang memiliki pinjaman besar dalam mata uang AS. Keadaan diperburuk dengan adanya semacam "run on bank."

Devaluasi 28% sangat mengejutkan sektor swasta sebab jika seseorang meminjam US\$10 juta dari luar dengan dasar dollar ia secara mendadak harus membayar 28% lebih, artinya menghapus segala kemungkinan untung. Lagipula, pemerintah juga mengatur kembali (rephase) sejumlah proyek besar, yang telah disetujui, jadi menempatkan mereka yang terlibat dalam suatu dilema. Ini diikuti oleh deregulasi industri perbankan untuk menarik lebih banyak dana dari masyarakat yang memungkinkan bank-bank milik pemerintah untuk menetapkan suku bunga pada deposito berjangka berdasarkan mekanisme pasar bebas, yang sekarang berkisar dari 16,5% hingga 18,5% pada deposito 3 bulan hingga 1 tahun. Suku bunga deposito-deposito yang ditetapkan oleh bank-bank swasta, baik asing maupun dalam negeri, bahkan lebih tinggi. Suku bunga yang baru ini memiliki efek yang merugikan pada pasar bursa yang menjamin pengembalian investasi atau deviden sekitar 15%. Deregulasi ini telah mengakibatkan hampir berakhirnya perusahaan-perusahaan yang mempunyai rencana untuk "go public."

Keputusan lain yang baru-baru ini diambil adalah pembaharuan perpajakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dari pajak dan jumlah wajib pajak. Pembaharuan perpajakan yang mencakup sistem tarif baru dan Pajak Pertambahan Nilai ini telah diterima dengan berbagai perasaan oleh masyarakat pada umumnya. Akan tetapi pejabat pajak ditetapkan untuk melaksanakan undang-undang perpajakan yang baru mulai 1 April 1985.

Keputusan pemerintah untuk menyederhanakan peraturan dan prosedur merupakan usaha yang sudah pernah dilakukan beberapa waktu sebelumnya, tetapi pelaksanaannya umumnya kurang berhasil. Keputusan pemerintah akan ada, dan penyederhanaan prosedur akan dirumuskan, tetapi berbagai birokrat yang harus menafsirkan penyederhanaan tersebut akan memiliki versi dan waktu sendiri dan kerap kali tanpa suatu perasaan yang mendesak. Barangkali tidak banyak perubahan yang dapat diharapkan jika dari sudut pandangan struktural mereka yang melaksanakan undang-undang tersebut masih menganggap diri sebagai "penguasa" daripada pelayan masyarakat, sehingga sektor swasta hanya bisa menerima penafsiran tersebut. Kenyataan

bahwa sektor impor sendiri harus melewati 34 meja benar-benar bukan senda gurau tetapi kenyataan hidup yang harus dihadapi wirausaha swasta yang terlibat dalam bisnis impor. Bagi mereka yang berada di sektor ekspor, jumlah meja rupanya telah dikurangi menjadi 15 namun masih merupakan pekerjaan yang memakan waktu bagi negara yang sangat membutuhkan devisa dari ekspor non-minyak. Meja-meja di sini diartikan sebagai penandatanganan birokrat yang menangani berbagai bagian proses untuk melengkapi dokumentasi bagi impor dan ekspor.

INDIKATOR-INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Neraca pembayaran Indonesia pada 1984 menunjukkan surplus US\$943 juta pada tahun kalender 1984 dibandingkan dengan US\$654 juta pada 1983. Cadangan devisa Indonesia pada 31 Desember 1984 berjumlah US\$5.751 juta. Devisa di tangan bank-bank devisa diperkirakan sekitar US\$4,3 milyar, sehingga cadangan devisa nasional berjumlah sekitar US\$10 milyar. Terhadap jumlah ini dana dari sumber-sumber IGGI yang belum dikeluarkan dan diperkirakan sekitar US\$3 milyar bisa ditambahkan.

Jika informasi kami benar, Indonesia juga telah menandatangani semacam "standby agreement" dengan suatu konsorsium bank sejumlah US\$750 juta. Dari angka-angka ini dapat disimpulkan bahwa cadangan devisa Indonesia kelihatannya cukup memberi harapan.

Perbaikan neraca pembayaran diakibatkan oleh kenaikan pendapatan minyak sebesar 3% yang mencapai angka US\$11.752 juta pada 1984. Kenaikan 31,8% ekspor LNG berjumlah US\$3.014 juta dan kenaikan ekspor non minyak 19% berjumlah US\$5.943 juta. Jadi mengenai ekspor non minyak, angka US\$6 milyar pada 1980 belum terlampaui.² Sebaliknya impor komoditi non minyak menurun 10% dari US\$13.896 juta hingga US\$12.496 juta. Ini mengakibatkan defisit US\$3.056 juta dibandingkan dengan defisit 1983 sebesar US\$6.442 juta.

Pada bulan Juni 1984, utang luar negeri Indonesia berjumlah US\$23,2 milyar (sekarang sekitar US\$25 milyar yang sedikit melampaui ratio 20%), yang terdiri atas US\$21,6 milyar utang pemerintah dan US\$1,6 milyar utang perusahaan-perusahaan negara. Ini mungkin tidak mencakup utang-utang Garuda Indonesian Airways yang tidak dijamin pemerintah dan juga utang-utang perusahaan-perusahaan swasta terhadap masyarakat perbankan internasional. Kira-kira 75% utang pemerintah berasal dari pinjaman lunak dan

²Sadli, M., "Prospek Pemasaran Industri di Indonesia," yang diberikan di Fakultas Teknologi, Universitas Gadjah Mada, 26 Februari 1985.

setengah lunak (pinjaman konsesi) dan sisanya dari pinjaman-pinjaman komersial dari masyarakat perbankan internasional.

Kredit-kredit dari sektor perbankan meningkat 24% (Rp3.636 juta pada 1984) yang menunjukkan bahwa sektor perbankan telah berpartisipasi aktif dalam membiayai berbagai kegiatan sektor ekonomi dan bisnis.³ Tingkat pertumbuhan yang diharapkan dalam Repelita IV diperkirakan sekitar 5% setiap tahun setelah mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata 7% selama 15 tahun terakhir.

ANGGARAN PEMERINTAH 1985/1986

Masyarakat bisnis bertanya-tanya apakah anggaran 1985/1986 akan meningkatkan bisnis yang akhir-akhir ini menurun. Namun demikian harus dicatat di sini bahwa salah satu sasaran anggaran adalah bahwa tindakan fiskal yang diambil seharusnya menjamin pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara. Digambarkan bahwa anggaran akan meningkat 23% untuk pengeluaran rutin dan 1,8% hingga 2,0% untuk pengeluaran pembangunan. Kenaikan 23% untuk pengeluaran rutin meliputi kenaikan gaji pegawai sipil dan personal militer, yang berkisar 35% dalam hal pensiunan dan 48,5% dalam hal subsidi kepada pegawai sipil di daerah otonom.

Terdapat 1,8 juta pegawai sipil dan personal militer pada tingkat pemerintah pusat dan 1,5 juta pada tingkat pemerintah daerah (*Tempo*, 12 Januari 1985). *Tempo* telah melakukan perhitungan sebagai berikut:

a. Pada tingkat pemerintah pusat, kenaikan	Rp 800 milyar
b. Pada tingkat pemerintah daerah, kenaikan	Rp 800 milyar
c. Bagi personal di daerah otonom, kenaikan	Rp 244 milyar
Total	Rp1.844 milyar

Jika kita memasukkan Rp1.844 milyar, kenaikan harga bagi padi para petani, jumlah yang diinjeksi ke dalam perekonomian kiranya lebih daripada Rp2.000 milyar. Jadi rata-rata antara Rp160 milyar dan Rp170 milyar sebulan. Lagipula, jika kita memasukkan proyek-proyek yang disebut SIAP dalam hal mana biaya yang masih harus dikeluarkan berjumlah Rp2.100 milyar, jumlah yang diinjeksi ke dalam perekonomian akan mampu meningkatkan perekonomian yang lesu. Ini berarti bahwa masyarakat bisnis bisa mengharapkan peningkatan kegiatan mereka. Namun demikian, ini hanya terbatas bagi barang-barang yang tidak mewah. Jadi mereka yang terlibat dalam industri pangan,

³Semua angka dan catatan diambil dari Pidato Gubernur Bank Indonesia, 1 Januari 1985.

tekstil (termasuk pakaian) dan sepeda, bisa memperoleh keuntungan dari kenaikan suplai uang ini, tetapi bukan bagi mereka yang terlibat dalam industri elektronik dan otomotif.

Kenaikan gaji pegawai negeri dan personal militer diharapkan akan berasal dari kenaikan dalam penghasilan dari pajak langsung. Dikatakan bahwa undang-undang perpajakan yang baru akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang pada gilirannya akan meningkatkan penghasilan pemerintah.

Aspek lain yang diamati secara hati-hati oleh masyarakat bisnis adalah penerimaan minyak. Amat dipahami bahwa harga minyak sekarang ini tidak pasti. Jatuhnya harga US\$1 per barrel akan berarti penurunan pendapatan sekitar US\$330 juta. Jika situasi semakin buruk dan kejatuhan harga US\$3 per barrel tidak dapat dihindari, maka jatuhnya pendapatan sekitar US\$1 milyar tidak dapat dihindari. Tetapi dikatakan bahwa cadangan devisa nasional lebih dari US\$10 milyar, dana yang belum dikeluarkan dari sumber-sumber bantuan US\$3 milyar, dan persetujuan kredit yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu sebesar US\$750 juta bisa menutupi penurunan sementara pendapatan minyak. Barangkali suatu hal yang lebih tidak pasti adalah jumlah negara pengimpor minyak seperti Jepang yang baru-baru ini mulai mendiversifikasi sumber-sumber bagi kebutuhan minyak mereka. Penurunan ke sekitar 13% dari volume impor dan 15% hingga 16% dari seluruh impor minyak kiranya cukup berarti bagi Indonesia. Ketika Jepang sangat membutuhkan minyak, Indonesia dianggap sebagai suplai yang dipercaya dan diandalkan. Akan tetapi waktu telah berubah. "Kawan" yang baik dan membantu di masa lalu dengan "mudah" dilupakan. Jepang dan perusahaan-perusahaan perdagangannya yang besar telah menjadi pedagang minyak dunia, termasuk memasarkan minyak dari Cina. Penurunan permintaan dari konsumen yang begitu besar seperti Jepang mempengaruhi pendapatan minyak Indonesia, sehingga mengharuskan Indonesia mencari konsumen-konsumen minyak yang baru. Korea Selatan, yang juga pada saat lalu pernah dibantu Indonesia dalam hal kebutuhan minyak mereka, sekarang telah beralih ke Cina untuk suplai minyaknya. Negara ini harus meningkatkan pengambilan minyak dari Cina, baik untuk alasan politik maupun komersial.

Biasanya bila masyarakat bisnis memperkirakan penurunan harga minyak, desas-desus penyesuaian atau devaluasi rupiah mulai mengganggu kestabilan ekonomi nasional. Walaupun mungkin beberapa masih memperkirakan semacam devaluasi, mayoritas kelihatannya berkesimpulan bahwa untuk sesedikitnya enam bulan tidak akan ada tindakan moneter seperti itu (lihat tabel mengenai pembelian devisa melalui Bank Indonesia). Akan tetapi masyarakat bisnis mengetahui bahwa rupiah berada pada suatu basis yang mengambang secara terkendali. Mereka memperkirakan suatu penyesuaian rupiah secara

perlahan-lahan sebesar 5% hingga 10% dalam satu tahun, berdasarkan persentase yang dialami pada 1984.

Beberapa tabel anggaran 1985/1986 yang berkaitan dimasukkan pada bagian akhir tulisan ini.

USAHA PEMERINTAH UNTUK MEMBANGKITKAN KEMBALI BISNIS?

Jika kita mengamati berbagai langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mempertahankan kestabilan ekonomi, seperti mengatur proyek-proyek yang menyerap banyak devisa, deregulasi industri perbankan dengan maksud untuk membuat industri perbankan lebih otonom dalam mengumpulkan dana dari masyarakat, penerapan undang-undang perpajakan yang baru sehingga kita harus mencari dana-dana baru melalui devaluasi untuk menciptakan sumber dana yang lebih sehat melalui pajak langsung, dan peningkatan pendapatan melalui perubahan-perubahan kebijakan industri pariwisata, serta pengurangan pengeluaran, penurunan jumlah impor komoditi yang tidak dibutuhkan, maupun peningkatan efisiensi melalui penyederhanaan prosedur-prosedur. Semua tindakan moneter dan fiskal tersebut tampaknya ditujukan untuk menjamin pertumbuhan dan kestabilan ekonomi.

Masyarakat bisnis sepakat bahwa kestabilan ekonomi Indonesia telah berhasil dipertahankan dengan tingkat inflasi di bawah dua digit, yakni sekitar 9,7% pada 1984. Akan tetapi beberapa kalangan masyarakat bisnis telah memberi komentar bahwa kestabilan ini telah dicapai dengan pengorbanan dalam bentuk stagnasi pada tingkat tertentu dalam kegiatan bisnis.

Jika kita mengamati indikator-indikator ekonomi dan agregat makro serta juga berbagai aspek anggaran 1985/1986, pemerintah benar-benar telah mencapai kestabilan ekonomi, walaupun masih tanda tanya apakah tingkat pertumbuhan 5% bisa dicapai jika kita memperhatikan menurunnya kegiatan bisnis. Jika kita memperhitungkan indikator-indikator makro, bisa disimpulkan bahwa terdapat kestabilan ekonomi di Indonesia pada 1984, tetapi sekali lagi sebagaimana disebut oleh beberapa kalangan adanya pengorbanan dalam bentuk stagnasi kegiatan bisnis. Tentu seseorang dapat mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tidak memuaskan semua pihak dalam masyarakat. Akan tetapi masalahnya adalah bahwa sektor bisnis memberi pekerjaan kepada berjuta-juta tenaga kerja. Jika perusahaan harus memecat tenaga-tenaga kerja tersebut, akibatnya terjadi ketidakstabilan. Oleh karena itu menurunnya kegiatan bisnis bisa mengakibatkan efek yang merugikan bagi kestabilan ekonomi negara.

MENGAMATI LESUNYA BISNIS

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penulis menyoroti masyarakat bisnis swasta yang telah berkembang sebagai pemberi pekerjaan kepada berjuta-juta tenaga kerja.

Mayoritas industri seperti tekstil, pangan, elektronik, alat-alat berat, otomotif, semen, bahan-bahan bangunan, sepeda motor, ban, kosmetik, kayu lapis dan perjalanan tampaknya telah beroperasi di bawah kapasitas. Misalnya, beberapa perusahaan yang menghasilkan alat-alat berat, biayanya mencapai beratus-ratus juta dollar, dan telah meminjam banyak dari sumber-sumber dollar dan rupiah. Barangkali sedikit industri seperti pasar swalayan dan perusahaan rokok kretek tidak merasakan pengaruhnya. Misalnya, pasar-pasar swalayan tampaknya dapat mempertahankan posisi mereka oleh karena segmen konsumen tertentu. Mereka umumnya melayani konsumen berpendapatan tetap yang menjadi langganan mereka. Industri rokok kretek yang terbatas pada perusahaan-perusahaan besar seperti Gudang Garam, Jarum, dan Bentul, tampaknya mengelola dengan baik kegiatan industri mereka, khususnya dalam mengatasi kesulitan untuk memperoleh bahan-bahan mentah utama (cengkeh) yang semakin langka, sedang pabrik-pabrik berukuran menengah dan kecil menemui kesulitan untuk melakukan penyimpanan cengkeh karena kekurangan dana dan fasilitas-fasilitas penyimpanan. Jadi, hanya pabrik-pabrik rokok kretek besar yang "bebas resesi," pabrik-pabrik berukuran menengah mungkin dipaksa oleh keadaan untuk menghentikan operasi mereka.

DAYA BELI KONSUMEN

Daya beli berjuta-juta konsumen menurun pada 1984. Konsumen yang biasanya memperoleh pendapatan mereka dari apa yang disebut hasil panen komersial di daerah-daerah pertanian dan petani-petani tampaknya telah mengalami penurunan pendapatan oleh karena menurunnya ekspor bahan-bahan mentah ini. Misalnya, petani di daerah-daerah tanaman tembakau telah bertahun-tahun menderita karena menurunnya pendapatan, sehingga apa pun yang masih mereka peroleh akan dibelanjakan pada tingkat pertama untuk makanan. Ini kiranya juga sama dengan sektor-sektor pertanian lainnya seperti tapioka, karet, teh, dan kopi. Barangkali di daerah-daerah pertanian karet dan lainnya beberapa perbaikan kelihatan nyata terutama oleh karena meningkatnya ekspor karet.

Dalam situasi ini banyak industri manufaktur tidak akan mampu memasarkan semua produk ke konsumen akhir. Hampir semua produk mereka akan tetap merupakan persediaan di gudang, karena *pengecer* dan *agen*

tidak akan mengambil risiko untuk memiliki stok produk yang tidak dapat dijual. Jadi, untuk bisa menyalurkan produk-produk mereka, perusahaan-perusahaan mungkin harus menggunakan metode-metode yang lebih agresif dengan memberi kredit tiga hingga enam bulan kepada agen dan pengecer, untuk mendorong produk-produk mereka. Beberapa dari mereka telah berhasil mendorong produk-produk melalui jalur-jalur yang relevan, tetapi beberapa mungkin tidak, dalam hal mana mereka harus memperpanjang kredit kadang-kadang sekitar satu tahun. Jika mereka meminjam dana dari bank-bank komersial dengan suku bunga tinggi, mereka harus membayar bunga dari 25% hingga 30% setiap tahun, jadi menghapus semua keuntungan yang diharapkan, belum lagi berbicara mengenai pengeluaran lain dalam menjalankan pabrik seperti pembayaran kembali dan bunga, pinjaman-pinjaman asing mereka untuk membiayai mesin, peralatan, biaya perijinan, dan lain-lain. Schubungan dengan daya beli yang lemah banyak industri manufaktur harus mengurangi kapasitas produksi mereka, beberapa hanya 30%, 40%, atau 60%.

DAMPAK KELAMBANAN

Menurunnya kapasitas akan memaksa mereka untuk mengurangi tenaga kerja. Semula mereka bisa bekerja setengah hari dan kemudian "merumahan" jumlah tertentu tenaga kerja, tetapi tetap membayar gaji mereka. Jika keadaan semakin memburuk, mereka selanjutnya terpaksa melakukan PHK terhadap tenaga kerja dengan meminta ijin dari pihak yang berwenang. Pada dasarnya Departemen Tenaga Kerja berusaha mencegah hal ini, tetapi jika mereka menolak memberi ijin kepada pabrik-pabrik untuk mem-PHK-kan tenaga kerja perusahaan-perusahaan ini akan mengalami kebangkrutan yang tidak diinginkan pemerintah.

Dampak lainnya adalah menurunnya pembayaran kembali utang-utang ke bank yang sejauh ini mereka anggap sebagai modal-operasi (*operating capital*) dan juga pembayaran kembali hutang luar negeri (*off shore debt*) ke bank-bank asing serta bank-bank komersial nasional. Oleh karena itu, bank-bank akan terpaksa menjadwalkan kembali (*reschedule*) beberapa pembayaran dan mungkin perlu bersabar dalam penanganan utang yang tertunggak.

Perusahaan-perusahaan asing perlu menunggu pembayaran royalty, tetapi banyak dari mereka akan menekan rekan domestik demi tercapainya sasaran mereka, yang berarti bahwa impor komponen dan produk-produk lain dari perusahaan asing perlu diteruskan, karena jika tidak partner asing akan mengancam untuk menarik lisensi pabrik mereka. Walaupun menurut peraturan-peraturan pemerintah, mereka tidak diijinkan untuk mengalihkan per-

wakilan utama (*sole agency*) ke pihak-pihak lain yang berminat, dalam kenyataan mereka banyak menekan agen-agen mereka, seperti menarik dukungan mereka ke bank-bank seperti *Bank of Tokyo* atau untuk hal tersebut, menghentikan fasilitas-fasilitas keuangan lainnya.

Sementara kelesuan masih berlangsung, peraturan perpajakan yang baru akan menambah ketegangan perusahaan-perusahaan karena Pajak Pertambahan Nilai atau pajak atas barang-barang mewah tentu akan meningkatkan harga jual yang lebih besar. Dengan pasar yang lesu, para industriawan bertanya-tanya apakah mereka dapat meningkatkan harga jual produk mereka.

Beberapa bulan mendatang akan ditunjukkan apakah ini mungkin atau tidak, walaupun harga jual yang ada telah turun. Beberapa industri kiranya lebih optimistik akan penjualan 1985. Begitu banyak industri sekarang ini sedang bersikap "menanti dan melihat." Namun demikian beberapa dari mereka kelihatannya bersikap lebih agresif.

INJEKSI UANG DALAM PEREKONOMIAN

Harapan di kalangan industriawan adalah bahwa injeksi Rp2.000 milyar dan pengeluaran SIAP di tingkat pemerintah daerah akan mengakibatkan membaiknya kembali daya beli konsumen. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, ini hanya dimungkinkan bagi barang-barang konsumen, tetapi barang-barang bersifat tahan lama (*durable goods*) seperti mobil, pesawat televisi, video tape, tidak terpengaruh. Pengaruh ganda hanya dirasakan setelah April 1985. Jika pengeluaran SIAP dilakukan secara lebih efektif, banyak industri konstruksi, asbes, ubin, batu bata, dan lain-lain merasakan dampak dari peningkatan kegiatan. Dan jika dimulai pada tingkat pemerintah regional, kegiatan-kegiatan ini akan merangsang beberapa industri di tingkat daerah dan pusat.

KELESUAN BISNIS DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Kelesuan bisnis akan mempengaruhi penanaman modal. Sebagaimana ditunjukkan sebelumnya, banyak industriawan beroperasi di bawah kapasitas. Dapat diperkirakan bahwa mereka tidak akan memikirkan perluasan usaha sekarang ini hingga merasa yakin bahwa mereka dapat beroperasi dengan kapasitas penuh atau mengharapkan dapat beroperasi dengan kapasitas penuh dalam jangka pendek. Akan tetapi banyak dari industriawan ini tidak memikirkan atau memulai usaha-usaha baru. Lebih jauh, mereka juga memiliki

utang yang besar hingga tidak mudah meminjam uang untuk investasi baru, karena sumber-sumber keuangan nasional dan asing tentu menolak permohonan tersebut. Dengan kata lain, sulit mengharapkan sektor swasta memulai usaha baru dalam tahun 1985 atau 1986. Sebaliknya dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, pemerintah mengharapkan investasi besar-besaran di sektor swasta dalam industri yang berorientasi ekspor dan menguntungkan. Dengan prospek yang suram ini, para ekonom tampaknya berpendapat bahwa sasaran pertumbuhan 5% terlalu tinggi. Akan tetapi kita masih berada dalam tahun kedua Repelita IV, dan masih terdapat sisa 3 tahun lagi.

PENANAMAN MODAL ASING

Indonesia aktif meningkatkan penanaman modal asing, tetapi prospeknya masih sangat suram. Indonesia telah dianggap oleh banyak para calon investor tidak memiliki iklim yang menarik bagi penanaman modal asing. Beberapa faktor kendala dalam daftar mereka adalah risiko politik, ketidakkonsistenan peraturan, penanganan permohonan secara birokrasi, dan kesulitan lainnya sejauh menyangkut keinginan pihak asing. Di samping itu, banyak industri telah dianggap tertutup bagi penanaman modal asing dan kadang-kadang juga tidak tersedia bagi penanaman modal dalam negeri. Akan tetapi mungkin alasan yang lebih penting untuk tidak menanamkan modal di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah beralihnya arah dan perhatian para investor asing.

Jika 10 hingga 15 tahun lalu banyak investor asing terutama Jepang, tertarik untuk menjamin suplai bahan mentah dari negara-negara berkembang, sekarang mereka mengalihkan perhatian ke negara-negara industri. Akhir-akhir ini terjadi kelimpahan persediaan dalam suplai bahan mentah. Dengan demikian mereka dengan mudah memperoleh setiap komoditi seperti karet, timah dan tembaga. Kebijakan dan arah penyesuaian industri mereka ke industri teknologi maju dan tinggi menyebabkan berkurangnya ketergantungan pada suplai energi dan bahan mentah.

Hal ini mendesak mereka untuk mengalihkan perhatian ke negara-negara industri maju seperti Jepang dan Amerika Serikat. Mereka tidak hanya menanamkan modal di Amerika Serikat tetapi juga berminat untuk memanfaatkan industri-industri teknologi maju di negara tersebut. Mereka juga berminat untuk mengembangkan dan melanjutkan akses ke riset dan teknologi di Amerika Serikat. Tidak hanya perusahaan-perusahaan Jepang, yang datang ke Amerika Serikat untuk investasi, tetapi banyak juga industriawan Eropa mengambil keuntungan. Untuk menunjang investasi mereka di negara-negara maju, banyak industri penunjang dan jasa Jepang, seperti perbankan, juga

telah melakukan investasi besar-besaran di negara tersebut dalam sektor jasa (atau perbankan) dan komersial. Perkembangan tersebut dapat dilihat di Tabel 4 yang menunjukkan penanaman modal asing Jepang. Di samping peralihan dari negara-negara industri seperti Jepang dan Eropa Barat, investor-investor Amerika Serikat juga telah mengalihkan perhatian ke Amerika Serikat. Banyak kesempatan dalam industri-industri maju dan banyak MNC Amerika telah menarik investasi mereka di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (seperti Georgia Pacific), untuk menanamkan modal mereka di industri maju dan tinggi di negara mereka sendiri.

Hasil-hasil investasi di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya masih menarik dan lebih-lebih hampir tidak memiliki risiko politik. Apa yang terjadi sekarang adalah bahwa Amerika Serikat telah menjadi negara pengimpor modal, sedangkan Jepang telah menjadi negara pengekspor modal yang matang. Surplus perdagangan Jepang tampaknya telah diinvestasi di negara-negara industri. Kecenderungan ini diperkirakan akan terus, karena negara-negara ini menganggap industri-industri maju sebagai motor penggerak baru bagi pertumbuhan.

Dengan adanya aspek domestik dan pengalihan perhatian para calon investor asing ke negara-negara industri serta peralihan dari negara yang mendasarkan diri pada sumberdaya alam, dalam benak kita akan memperkirakan bahwa di tahun-tahun mendatang penanaman modal asing di sektor-sektor manufaktur tradisional tidak akan datang jika kita mencoba menarik investasi asing dalam bentuk promosi di negara-negara industri.

PENANAMAN MODAL ASING DAN PEMBANGUNAN MODAL DALAM NEGERI DI INDUSTRI-INDUSTRI YANG BERORIENTASI EKSPOR

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penting sekali bagi kita memikirkan perumusan suatu program untuk menarik PMA dan PMDN dalam industri-industri berorientasi ekspor. Ini bukan merupakan tugas yang mudah, dan hanya dengan suatu perumusan program yang terperinci dengan banyak usaha kita bisa menarik para investor untuk industri-industri ini. Apabila kita menengok ke perusahaan-perusahaan multinasional, yang mungkin tertarik pada industri yang berorientasi pada ekspor, kita pertama-tama akan melihat dan mempertimbangkan perusahaan-perusahaan multinasional yang telah berkembang sebagai pedagang-pedagang internasional dan global.

Dari sudut pandangan perdagangan dunia, pilihan kita akan diarahkan pada Perusahaan-perusahaan Perdagangan Umum Jepang (Sogo Shosha).

Perusahaan-perusahaan ini telah mengembangkan keahlian dalam mengeksport produk dari Indonesia ke dunia internasional. Kami telah melakukan survei tentang Sogo Shosha dan sampai sejauh mana mereka telah berhasil dalam memasarkan produk-produk Indonesia di dunia internasional. Sejauh penilaian kami, mereka cukup berhasil. Jumlah yang diekspor berkisar dari US\$60 juta hingga sekitar US\$250 juta. Perusahaan-perusahaan perdagangan umum yang telah turut mengembangkan ekspor produk-produk non minyak dari Indonesia, kiranya merupakan kelompok yang paling memenuhi syarat untuk didekati agar menanamkan modal di industri-industri yang berorientasi ekspor. Selain perusahaan-perusahaan perdagangan umum Jepang, perusahaan-perusahaan perdagangan umum Korea (Chaebol) kiranya merupakan kelompok berikut yang perlu didekati, tetapi sekarang perusahaan-perusahaan ini kiranya memiliki banyak kesulitan dengan pemerintah mereka sendiri, sehubungan dengan status dan pemusatan kekuatan mereka dalam bisnis. Mereka masih menghadapi sejumlah kebijakan yang mungkin memiliki dampak terhadap kemampuan operasi mereka di dunia internasional. Mungkin terdapat kelompok-kelompok lain seperti toko-toko serba ada yang beroperasi di Amerika Serikat, Jepang dan Eropa Barat, tetapi mereka sendiri kiranya tidak mampu membangun industri yang berorientasi ekspor di Indonesia karena mereka telah memiliki suplai di Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong. Gabungan perusahaan-perusahaan perdagangan umum Jepang/toko-toko serba ada dan partner-partner nasional mungkin tertarik untuk memulai industri yang berorientasi ekspor. Akan tetapi program industri berorientasi ekspor dan formulasinya sebaiknya menjadi bagian strategi ekspor nasional negara. Namun demikian salah satu kendala yang paling utama di tahun-tahun mendatang adalah meningkatnya kecenderungan ke arah proteksionisme khususnya undang-undang perdagangan Amerika baru yang mungkin mak-sudnya serupa dengan *American Incorporation*.

KESIMPULAN

Tulisan ini merupakan pandangan seorang pengusaha. Pertumbuhan bisnis selalu mencerminkan kekuatan dan kelemahan ekonomi nasional. "Credit standing" yang diperoleh pemerintah Indonesia telah membantu pengusaha-pengusaha swasta di Indonesia untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan mereka.

Setelah masa pertumbuhan pesat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7% dalam 15 tahun, tingkat pertumbuhan 1983 hampir nol berdasarkan harga 1981, sementara dalam Repelita IV diperkirakan tingkat pertumbuhan rata-rata 5%. Menurunnya pertumbuhan ekonomi mempengaruhi masyarakat bisnis Indonesia.

Kebijakan-kebijakan yang tepat telah dirumuskan dan dilaksanakan, yakni pengaturan (rephasing) beratur-ratus proyek yang menyerap banyak devisa, deregulasi industri perbankan, pembebanan undang-undang perpajakan yang baru, dan pengawasan pengeluaran. Indikator-indikator ekonomi nasional, seperti cadangan devisa Indonesia, yang telah melampaui angka US\$10 milyar, "standby credit," dan jenis cadangan-cadangan lain, bersamaan dengan tingkat inflasi yang rendah di bawah dua digit (9,7%) dan utang pemerintah yang berjumlah US\$23,2 milyar yang 70% nya adalah pinjaman konsesi dan semi konsesi, menunjukkan telah dicapainya suatu kestabilan ekonomi.

Anggaran pemerintah ditujukan antara lain untuk meningkatkan kestabilan dan pertumbuhan negara yang meliputi usaha untuk menaikan kemunduran sektor bisnis. Injeksi sekitar Rp2.000 milyar dan peningkatan pengeluaran proyek-proyek SIAP yang diperkirakan sekitar Rp2.108 milyar diharapkan akan meningkatkan sektor bisnis. Akan tetapi tidak semua industri akan memperoleh keuntungan dari injeksi ini. Industri barang-barang konsumen dan bahan konstruksi mungkin akan memperoleh keuntungan, tetapi tidak bagi industri konsumen yang tahan lama (*durable*) seperti industri otomotif.

Kelesuan bisnis telah mempengaruhi ketenagakerjaan. Beberapa tenaga kerja telah di-PHK karena industri-industri beroperasi di bawah kapasitas. Akan tetapi pasar-pasar swalayan dan pabrik-pabrik rokok kretek Gudang Garam, Jarum, dan Bentul mungkin kekecualian, karena mereka beroperasi dengan kapasitas penuh. Alasan utama kemunduran bisnis ini, yang tidak hanya mempengaruhi tenaga kerja tetapi juga bank-bank, adalah lemahnya daya beli berjuta-juta konsumen. Menurunnya kegiatan bisnis dan berkurangnya daya beli konsumen telah menciutkan arus barang dan uang. Diharapkan bahwa injeksi bertrilyun-trilyun dollar bisa membuat arus tersebut kembali normal. Walaupun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti undang-undang perpajakan yang baru yang terdiri atas PPn dan Pajak atas barang mewah. Ini bisa meningkatkan harga komoditi sehingga kenaikan harga penjualan dapat mempengaruhi kemampuan industri untuk keluar dari situasi bisnis yang buruk.

Kelesuan bisnis yang mengakibatkan rendahnya utilisasi kapasitas produksi terpasang bisa terbukti sebagai kendala terbesar bagi para industriawan untuk memperluas atau menambah investasi baru. Mereka akan menunggu hingga keadaan menjadi lebih jelas dan hingga pada saat ini pabrik-pabrik mereka tidak beroperasi dengan kapasitas penuh.

Perubahan PMA dari industri berdasarkan sumber daya alam ke industri teknologi lebih maju dan tinggi di negara-negara industri mempengaruhi sikap

Tabel 1

**ARUS DEvisa
SELAMA DESEMBER 1984**

Tanggal	Kurs Tengah (Rp)	Jumlah (US\$)
1.	1.068	7.282.809,47
2	—	—
3	1.068	9.300.000,00
4	1.068	12.700.000,00
5	—	—
6	1.068	7.000.000,00
7	1.068	9.953.821,17
8	1.069	6.210.536,07
9	—	—
10	1.069	17.500.000,00
11	1.069	57.850.000,00
12	1.069	45.950.000,00
13	1.069	33.300.000,00
14	1.069	40.400.000,00
15	1.069	6.098.555,01
16	—	—
17	1.069	19.150.000,00
18	1.069	3.909.092,81
19	1.069	6.600.000,00
20	1.070	4.648.459,94
21	1.071	6.543.783,45
22	1.071	7.801.148,85
23	—	—
24	1.071	—
25	—	—
26	1.072	7.623.108,99
27	1.072	14.300.000,00
28	1.073	44.495.000,00
29	1.074	11.900.000,00
30	—	—
31	—	—
Jumlah		380.516.315,76

**JUMLAH ARUS DEvisa
DAN KURS TENGAH**

1984	Jumlah (US\$)	Kurs Tengah (Rp)
Januari	696.871.587,38	993 - 995
Februari	279.916.435,16	992 - 995
Maret	399.939.129,17	992 - 1.000
April	480.000.000,00	1.000 - 1.009
Mei	322.097.572,90	1.005 - 1.009
Juni	351.302.631,91	1.009 - 1.015
Juli	827.316.301,89	1.015 - 1.027
Agustus	830.294.150,50	1.029 - 1.048
September	717.719.567,95	1.050 - 1.059
Oktober	576.446.727,36	1.059 - 1.061
November	480.094.112,98	1.061 - 1.067

Sumber: *Business News*, 2 Januari 1985

Tabel 1 (lanjutan)

ARUS DEVALISA SELAMA JANUARI 1985			ARUS DEVALISA SELAMA FEBRUARI 1985		
Tanggal	Kurs Tengah (Rp)	Jumlah (US\$)	Tanggal	Kurs Tengah (Rp)	Jumlah (US\$)
1	—	—	1	1.082	5.304.696,43
2	1.075	25.550.000,00	2	1.083	3.293.367,35
3	1.075	32.100.000,00	3	—	—
4	1.075	57.450.000,00	4	1.083	40.554.155,24
5	1.076	43.650.000,00	5	1.084	49.792.220,70
6	—	—	6	1.084	6.950.000,00
7	1.076	59.000.000,00	7	1.085	11.050.000,00
8	1.077	42.100.000,00	8	1.085	20.850.000,00
9	1.078	30.950.000,00	9	1.086	3.905.218,15
10	1.078	32.100.000,00	10	—	—
11	1.079	18.300.000,00	11	1.086	29.125.000,00
12	1.080	4.976.745,61	12	1.087	12.400.000,00
13	—	—	13	1.088	48.550.000,00
14	1.080	46.800.000,00	14	1.088	43.100.000,00
15	1.081	20.000.000,00	15	1.087	39.805.000,00
16	1.081	11.100.000,00	16	1.087	3.743.703,93
17	1.081	8.050.104,51	17	—	—
18	1.081	25.750.000,00	18	1.087	9.600.000,00
19	1.080	2.915.508,62	19	1.088	38.700.000,00
20	—	—	20	1.089	29.850.000,00
21	1.080	16.650.000,00	21	1.090	7.200.000,00
22	1.081	36.550.000,00	22	1.091	5.245.039,64
23	1.081	32.500.000,00	23	1.092	4.386.982,70
24	1.081	24.400.000,00	24	—	—
25	1.081	14.450.000,00	25	1.092	6.450.000,00
26	1.082	3.831.615,73	26	1.093	57.400.000,00
27	—	—	27	1.093	8.720.000,00
28	1.082	14.765.000,00	28	1.092	34.700.000,00
29	1.082	24.300.000,00			
30	1.082	18.770.000,00			
31	1.082	7.125.000,00			
Jumlah		654.133.974,47	Jumlah		521.070.384,14

Sumber: *Business News*, 1 Februari 1985Sumber: *Business News*, 1 Maret 1985

Tabel 2

1984/85 BUDGET AND 1985/86 DRAFT BUDGET
(Rp billion)

Revenues	1984/85	1985/86	% Change	Expenditures	1984/85	1985/86	% Change
A Internal revenues	16,149.4	18,677.9	15.7	A Routine expenditures	10,101.1	12,399.0	22.7
I Oil and natural	10,366.6	11,159.7	7.7	I Civil service:	3,189.5	4,117.3	29.1
- Oil	(8,895.1)	(9,479.6)	(6.6)	1 Rice allowance	415.7	482.5	16.1
- Natural gas (liqu)	(1,471.5)	(1,680.1)	(14.2)	2 Salaries/pension	2,307.9	3,115.8	35.0
II Non oil and non gas	5,782.8	7,518.2	30.0	3 Meal allowance	286.6	313.3	9.3
1 Income tax				4 Other benefits domestic	99.9	116.6	16.7
2 Corporate tax				5 Diplomatic service	79.4	89.1	12.2
3 MPO tax	2,451.1	3,074.0	25.4	II Goods procurement	1,263.9	1,529.9	21.1
4 PBRD tax				1 Domestic	1,207.8	1,451.8	20.2
5 Sales tax				2 Foreign	56.1	78.1	39.2
Value added tax on goods and services and sales tax on luxury goods	958.2	1,686.4	73.9	III Subsidies for			
6 Import sales	—	—	—	autonomous regions	1,784.6	2,590.4	45.1
7 Import duty	681.4	717.1	5.2	1 Civil service	1,581.4	2,349.0	48.5
8 Excise tax	727.5	963.3	32.4	2 Non civil service	203.2	241.4	18.8
9 Export tax	123.6	101.7	-17.7	IV Debt interest & instalment	2,686.1	3,559.1	32.5
10 Other taxes	150.6	167.4	11.2	1 Domestic	30.0	30.0	—
11 Regional development	75.4	96.4	27.9	2 Foreign	2,656.1	3,529.1	32.9
12 Non tax revenues	615.0	731.9	19.0	V Other expenditures	1,177.0	602.3	-48.8
B Development revenues (foreign aid):	4,411.0	4,368.1	-1.0	1 Oil fuel subsidies	1,147.0	532.3	-53.6
I Program aid	39.5	70.9	79.5	2 Others	30.0	70.0	133.3
II Project aid	4,371.5	4,297.2	-1.7	B Development expenditures	10,459.3	10,647.0	1.8
				I Rupiah financing	6,097.8	6,349.8	4.3
				II Project aid	4,371.5	4,297.2	-1.7
Total	20,560.4	23,046.0	12.1	Total	20,560.4	23,016.0	12.1

Sumber: Jakarta Post, 8 Januari 1985

Tabel 3

GOVERNMENT'S PROJECTIONS OF BALANCE OF PAYMENTS (US\$ million)

	1983/84 (Actual)	1984/85 (Estimate)	1985/86 (Projection)
I Goods & services:			
1 Exports FOB	19,816	19,779	21,327
- Oil & natural gas	14,449	13,729	14,318
- Non oil & non gas	5,367	6,050	7,009
2 Imports FOB	-16,304	-15,438	-16,634
- Oil & natural gas	-3,489	-3,269	-3,292
- Non oil & non gas	-12,815	-12,169	-13,342
3 Services	-7,663	-7,587	-8,102
- Oil & natural gas	-3,589	-3,411	-3,727
- Non oil & non gas	-4,074	-4,176	-4,375
4 Current account	-4,151	-3,246	-3,409
- Oil & natural gas	7,371	7,049	7,299
- Without oil & gas	-11,522	-10,295	-10,708
II Official loans	5,793	4,359	4,974
1 Program aid	84	58	65
2 Project aid & others	5,709	4,301	4,909
IV Miscellaneous capital	1,191	341	406
V Official debt repayment*	-1,010	-1,509	-1,698
VI Errors & omissions	247	698	—
VII Balance of payments	2,070	643	273

Note: *Principal payments only

Source: 1985/86 draft state budget

(*mood*) investor asing di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Calon-calon investor Jepang, Amerika, dan Eropa sekarang ini memusatkan perhatian pada industri teknologi maju dan tinggi yang dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan. Investasi tampaknya terpusat di Amerika Serikat. Negara ini telah menjadi negara pengimpor modal sementara Jepang telah menjadi negara pengekspor modal yang matang. Ini tampaknya akan tetap merupakan kecenderungan di tahun-tahun mendatang.

Satu-satunya daya tarik yang mungkin adalah bahwa kita sebaiknya memusatkan perhatian pada pengembangan suatu program terinci dan benar-benar dipikirkan mengenai cara menarik para investor untuk industri-industri nasional yang berorientasi ekspor. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa hanya perusahaan-perusahaan multinasional yang telah beroperasi sebagai pedagang-pedagang dunia mungkin berminat terhadap kemungkinan-

kemungkinan dan kesempatan-kesempatan yang akan diberikan oleh program-program investasi di industri-industri yang berorientasi ekspor. Calon-calon yang tampaknya masuk akal adalah perusahaan-perusahaan perdagangan umum (Sogo Shosha dan Chaebol) yang telah berhasil mengembangkan suatu keahlian dalam perdagangan dunia, toko-toko serba ada yang memiliki jaringan suplai internasional, atau kombinasi perusahaan-perusahaan perdagangan umum dan toko-toko serba ada.

Walaupun dewasa ini gambaran tidak terlalu cerah, dunia bisnis yang penuh dengan tantangan dan dinamisme wiraswasta akan mampu mengatasi segala hambatan dan resesi sementara yang dialami Indonesia. Sekali lagi walaupun dalam 1 atau 2 tahun dunia bisnis akan menghadapi sejumlah kendala, antara lain peraturan-peraturan perdagangan Amerika yang baru, kita yakin bahwa semuanya akan dilihat sebagai tantangan. Kesempatan-kesempatan baru akan muncul jika Indonesia berhasil melaksanakan program industri berorientasi ekspor. Akan tetapi kerja keras dan perubahan sikap akan membantu Indonesia berhasil dalam pencatatan bisnis internasional. Sekali sasaran ekspor US\$30 milyar ditetapkan, dalam 15-20 tahun mendatang sektor swasta memiliki banyak ruang untuk beroperasi.